

MELAWAN ANCAMAN IMIGRAN ILEGAL DAN TERORISME: KEBIJAKAN IMIGRASI PRANCIS ERA EMMANUEL MACRON TAHUN 2017-2021

Azrul Azis^{1)*}, Devita Prinanda²⁾

^{1,2)} Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

*Corresponding e-mail: azrulazis97@gmail.com

ABSTRAK

Pada masa pemerintahan Presiden Emmanuel Macron, Prancis menghadapi berbagai permasalahan imigran, mulai dari adanya kasus kekerasan, imigran ilegal, hingga berkaitan dengan terorisme, sehingga menimbulkan instabilitas di masyarakat. Merespon adanya permasalahan tersebut, Presiden Macron mengambil langkah untuk semakin menegatkan kebijakan imigrasi Prancis. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan imigran Prancis pada masa Pemerintahan Presiden Emmanuel Macron. Metode penelitian yang dipakai yaitu deskriptif kualitatif, dengan menggunakan Konsep *National Security* dan Konsep Kebijakan Kontrol Imigrasi untuk menggambarkan kebijakan imigrasi era Presiden Macron. Hasil yang didapatkan yaitu kebijakan imigrasi pada masa Pemerintahan Emmanuel Macron menjadi lebih ketat seperti disahkan-nya *Asylum and Immigration Act 2018*, menguatkan perbatasan Prancis, dan menggosok kamp-kamp imigran ilegal di Prancis. Berbagai kebijakan yang diambil tersebut dilatarbelakangi oleh adanya tingkat kasus kekerasan dan terorisme di Prancis yang berkaitan dengan imigran ilegal, sehingga untuk mencapai kepentingan stabilitas kemaanan dan sosial di Prancis, maka diperlukan kontrol kebijakan imigrasi yang ketat tersebut.

Kata Kunci: Emmanuel Macron, Imigran Ilegal, Kebijakan Imigrasi Prancis, Keamanan Nasional, Terorisme.

ABSTRACT

During the administration of President Emmanuel Macron, France faced various immigrant problems, ranging from cases of violence, illegal immigrants, to those related to terrorism, causing instability in society. Responding to these problems, President Macron took steps to further tighten France's immigration policy. The purpose of this study is to describe the implementation of the French immigrant policy during the government of President Emmanuel Macron. The research method used is descriptive qualitative, using the National Security Concept and the Immigration Control Policy Concept to describe the immigration policy of President Macron's era. The results obtained are that immigration policies during the Emmanuel Macron government have become more stringent, such as the enactment of the Asylum and Immigration Act 2018, strengthening French borders, and displacing illegal immigrant camps in France. The various policies taken were motivated by the high level of violence and terrorism cases in France related to illegal immigrants, so that in order to achieve the interests of French security and social stability, strict control of immigration policies was needed.

Keywords: Emmanuel Macron, France Immigration Policy, Illegal Immigrant, National Security, Terrorism.

PENDAHULUAN

Tahun 2017 menjadi waktu dimana Prancis menyaksikan bergantinya era kepemimpinan yang sebelumnya dijabat oleh Francois Hollande menuju Presiden Emmanuel Macron. Hal tersebut terjadi setelah Macron bersama partainya yakni En Marche memenangkan pemilu melawan saingannya yakni Marine Le Pen yang berhaluan sayap kanan konservatif. Perlu diketahui bahwasanya Macron merupakan seorang politisi yang berhaluan sentral dan memiliki visi pro-Eropa, pro-integrasi, dan pro-keterbukaan. Melalui visi dan jargon kampanye yang dibawa mampu mengantarkannya menuju Istana Elysee untuk memimpin Prancis hingga tahun 2022 (Pujayanti, 2017).

Persepsi publik pada awal kepemimpinan Macron menilai bahwa ia mampu membawa Prancis menuju ke arah yang lebih terbuka, dinamis, dan menjadi pemain sentral dalam Uni Eropa. Salah satu faktor optimisme tersebut dikarenakan Macron merupakan presiden Prancis termuda yang pernah menjabat, dan dianggap mampu untuk membawa Prancis menjadi lebih baik (Ratnasari, 2017). Negara Eropa lain pun juga berekspektasi bahwa Prancis akan dapat mengatasi permasalahan internal ataupun eksternalnya, semenjak isu mengenai ekonomi, pergesekan budaya, dan terorisme menjadi permasalahan utama bagi negara-negara Eropa (Leicester & Corbet, 2017). Selain itu kepemimpinan Macron ini juga menandakan pergeseran era dari dominasi partai sayap kiri kepada partai yang berhaluan sentral.

Secara keadaan, pemerintahan Macron menghadapi tantangan yang besar terutama dalam bidang ekonomi dan sosial-keamanan. Tuntutan akan adanya reformasi ekonomi di negara tersebut guna mengentaskan pengangguran menjadi salah satu urgensi utama yang harus diselesaikan. Isu sosial-keamanan juga tak kalah penting dimana Macron harus merespon secepat mungkin terhadap adanya ancaman terorisme yang sulit untuk diprediksi. Agenda pemberantasan kelompok Islam radikal menjadi agenda prioritas sembari harus menanggulangi isu sosial, dimana pada era sebelumnya Prancis belum berhasil mengintegrasikan masyarakat imigran generasi pertama dan kedua kedalam aspek sosio-ekonomi negara tersebut (Hershco, 2017).

Permasalahan tentang imigran sendiri telah menjadi sebuah kompleksitas

dalam kehidupan sosio-eko-politik di Prancis. Terdapat kurang lebih sebanyak 15 juta jiwa imigran muslim yang tinggal disana, atau sekitar 10% dari total populasi Prancis (Wicaksono, 2017). Mereka kerap mengalami perlakuan diskriminatif seperti sulitnya akses untuk memperoleh tempat tinggal bersubsidi dan hambatan untuk memperoleh jaminan sosial dan kesehatan. Faktor lain seperti adanya superioritas etnis lokal serta *xenophobia* yang mengaitkan para imigran dengan isu terorisme menyebabkan mereka semakin sulit untuk terintegrasi secara sempurna dalam tatanan sosial (Ayudia & Panggabean, 2009).

Masalah tersebut menimbulkan dampak negatif baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Berdasarkan survei oleh lembaga More in Common pada tahun 2017, sentimen negatif masyarakat terhadap para imigran terhitung besar yaitu sebanyak 56% dan hanya 16% yang berpendapat bahwa para imigran membawa dampak positif (More in Common, 2017). Sentimen negatif ini didasari oleh anggapan masyarakat bahwa para imigran gagal dalam berintegrasi baik dalam bidang budaya dan ekonomi. Selain itu, para imigran juga dianggap menjadi penyebab dari sulitnya mencari pekerjaan bagi penduduk asli Prancis, karena mereka bersedia bekerja di berbagai bidang dan dibayar dengan upah yang kecil (More in Common, 2017). Permasalahan lainnya yakni adalah peningkatan jumlah pencari suaka atau *asylum seeker* tiap tahunnya, terhitung di tahun 2018 terdapat 124.000 pencari suaka di Prancis (Piser, 2019).

Berbagai sentimen negatif terhadap imigran didasari oleh adanya ancaman kekerasan oleh para imigran itu sendiri. Terdapat beberapa contoh seperti kasus penyerangan Charlie Hebdo pada Januari 2015 yang menyebabkan 11 orang meninggal dunia, dan pelaku merupakan imigran yang berafiliasi dengan Al-Qaeda (Petrikowski, 2021). Kemudian, pada Februari 2018, terjadi baku tembak antar imigran di Kota Calais yang menyebabkan 4 orang kritis dan 11 orang luka-luka (Masters, 2018). Pada Oktober 2020, terdapat dua peristiwa penyerangan yang pertama pembunuhan seorang guru di Conflans-Sainte-Honorine bernama Samuel Paty, yang mana pelakunya merupakan seorang imigran muslim asal Chechnya. Pada bulan yang sama juga terdapat penyerangan dengan pisau di Kota Nice yang merenggut korban jiwa sebanyak 3 orang, dengan tersangka imigran asal Tunisia (British Broadcasting Corporation, 2020).

Pada masa awal pemerintahan Emmanuel Macron, kebijakan imigrasi Prancis lebih bersifat pro-imigran dan pencari suaka, sesuai dengan janji-janjinya saat kampanye pemilihan presiden Prancis 2017 (Wolf, 2017). Akan tetapi, adanya beberapa peristiwa penyerangan oleh imigran yang telah dijelaskan diatas membuat Pemerintah Prancis pada tahun 2018 mengambil berbagai kebijakan diantaranya yaitu memperketat pencari suaka dan imigran yang masuk ke Prancis (Piser, 2019). Hal ini kemudian menuai berbagai kritik di kalangan masyarakat, yang mana kebijakan Macron tersebut bertentangan dengan salah satu janji kampanyenya yaitu akan menyelesaikan permasalahan imigran dengan menjunjung tradisi HAM (Beardsley, 2018).

Implementasi kebijakan imigrasi tersebut menjadi penting untuk diketahui karena kebijakan tersebut merupakan respon Pemerintah Prancis dalam menghadapi ancaman terorisme. Kebijakan ini kemudian berdampak terhadap penurunan insiden terorisme di Prancis pada tahun 2018-2020 menjadi terdapat 19 insiden, dibandingkan pada tahun 2015-2017 dengan 40 insiden penyerangan terorisme (Sharma, 2020). Melihat hal tersebut, dapat diketahui bahwa tindakan terorisme yang datang dari imigran dapat disebabkan oleh kebijakan domestik yang bersifat diskriminatif. Akan tetapi setelah melakukan reformasi terhadap kebijakan imigrasi yang ada, tindakan tersebut mulai berkurang.

Penelitian ini mengambil berbagai studi literatur untuk menjadi bahan referensi pembandingan guna mendapatkan *research gap*. Elyana Ade dalam penelitiannya menjelaskan bahwa, kebijakan Macron dalam menangani gelombang migrasi yaitu melalui kebijakan *Balance & Firmness* yang merupakan suatu aspek pendekatan terhadap imigran dengan mengedepankan unsur humanis dalam pelaksanaannya (Pertwi, 2018). Zarra Valmayrilla menjelaskan Prancis pada masa pemerintahan Emmanuel Macron menerima sebanyak 24.000 pengungsi Suriah, yang mana hal tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan Prancis ingin menunjukkan kekuatannya dalam aspek ekonomi, politik, dan keamanan (Valmayrilla, 2018). Noviarin Cerahwati menjelaskan bahwa salah satu faktor kemenangan Emmanuel Macron pada pemilu 2017 adalah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan bersifat pro-imigran dan mendapatkan dukungan dari kaum imigran lokal (Cerahwati, 2018). Dalam analisis individual Emmanuel Macron,

Renny Puspitarini menjelaskan bahwa, Macron secara domestik mengedepankan pendekatan tegas dan kolaboratif kepada para imigran untuk meminimalisir adanya diskriminasi, dan secara hubungan luar negeri dia mendukung sanksi finansial kepada negara-negara anggota Uni Eropa yang tidak bersedia menerima imigran (Puspitarini & Afkarin, 2018).

Berdasarkan studi literatur di atas, terdapat persamaan mengenai pembahasan kebijakan Pemerintahan Emmanuel Macron dan kebijakan imigrasi dan suaka Prancis. Namun yang menjadi aspek pembeda dari penelitian ini adalah belum adanya pembahasan secara mendalam mengenai kebijakan imigrasi Emmanuel Macron yang mengaitkan permasalahan imigran ilegal dengan terorisme. Hal tersebut menjadi *research gap* yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan imigran Prancis pada masa Pemerintahan Emmanuel Macron.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Kebijakan Kontrol Imigrasi

Eytan Meyers menjelaskan bahwa pemerintahan dapat memberikan keputusan serta mengendalikan jumlah imigran yang masuk kedalam satu wilayah suatu negara. Terdapat 3 (tiga) variabel yang melatarbelakangi terbentuknya suatu kebijakan imigrasi, yakni: 1) Variabel kuantitas: Besaran jumlah imigran yang masuk dapat dipengaruhi oleh jenis kebijakan imigrasi suatu negara, peraturan yang bersifat liberal akan memberikan banyak peluang bagi para imigran untuk memasuki wilayah suatu negara, dan begitupula sebaliknya jika kebijakan restriktif akan berdampak pada sedikitnya imigran yang masuk; 2) Variabel kriteria imigran: Terdapat beberapa kriteria tertentu yang digunakan untuk menyaring imigran yang akan memasuki suatu negara seperti: ras, etnis, serta kebudayaan yang dimiliki; 3) Variabel tipe imigrasi: jenis imigrasi seperti pekerja migran sementara, imigrasi permanen, pengunjung, dan imigran ilegal dapat menentukan jenis dari kebijakan kontrol imigrasi (Meyers, 2004).

Selanjutnya, terdapat 5 faktor yang mempengaruhi adanya kebijakan kontrol imigrasi, yakni: *The State of The Economy* (keadaan ekonomi suatu negara); *The Volume of Immigration of Dissimilar Composition* (komposisi berbeda dari

jumlah imigran); *Wars and External Threats* (perang dan adanya ancaman dari luar); *Foreign Policy Considerations* (pertimbangan kebijakan luar negeri); *Ideological Cycles* (siklus ideologis) (Meyers, 2004). Pada penelitian ini, kebijakan kontrol imigrasi pada masa Pemerintahan Emmanuel Macron dipengaruhi oleh *wars and external threats* (faktor perang dan ancaman dari luar). Hal ini berarti kebijakan imigrasi Prancis akan berubah jika dalam situasi perang / terdapat ancaman eksternal salah satunya yaitu ancaman imigran ilegal dan terorisme, sehingga Prancis dapat membatasi dan menolak imigran yang berasal dari negara sumber terorisme.

Konsep *National Security*

Konsep *national security* atau keamanan nasional merupakan konsep yang berasal dari konsep keamanan. Terdapat berbagai pengertian mengenai konsep keamanan, sehingga dapat dikatakan sebagai konsep yang masih diperdebatkan (*contested concept*). Berdasarkan pengertiannya itu sendiri, Arnold Wolfers mengartikan keamanan sebagai “*Security, in any objective sense, measures the absence of the threats to acquired values and in a subjective sense, the absence of fear that such values will be attacked*” (Baylis & Smith, 2001). Berdasarkan pengertian tersebut, keamanan merupakan suatu kondisi dimana tidak adanya ancaman untuk memperoleh nilai dan tidak adanya ketakutan diserangnya nilai-nilai tersebut, yang mana nilai dapat diartikan sebagai suatu kepentingan yang dilindungi. Kemudian muncul konsep keamanan nasional, yaitu merupakan upaya dari negara dalam melindungi kepentingan nasionalnya dari ancaman yang bersifat internal maupun eksternal. Ancaman internal yaitu ancaman yang berasal dari dalam negara seperti kejahatan organisasi, kemiskinan, instabilitas politik, terorisme. Kemudian, ancaman eksternal yaitu ancaman yang datang dari luar negara berupa kejahatan transnasional, agresi militer, senjata pemusnah massal, bencana alam, dan lain-lain (Baylis & Smith, 2001).

Terdapat sumber dari ancaman keamanan nasional, yang mana Richar Ullman menjelaskan bahwa ancaman keamanan nasional yaitu suatu tindakan yang dapat mengancam secara drastis penduduk dan pemerintahan suatu negara, serta bagian non-pemerintah di negara tersebut (Ullman, 1983). Disisi lain, Barry Buzan membagi keamanan menjadi berbagai bidang dan memiliki ancaman yang

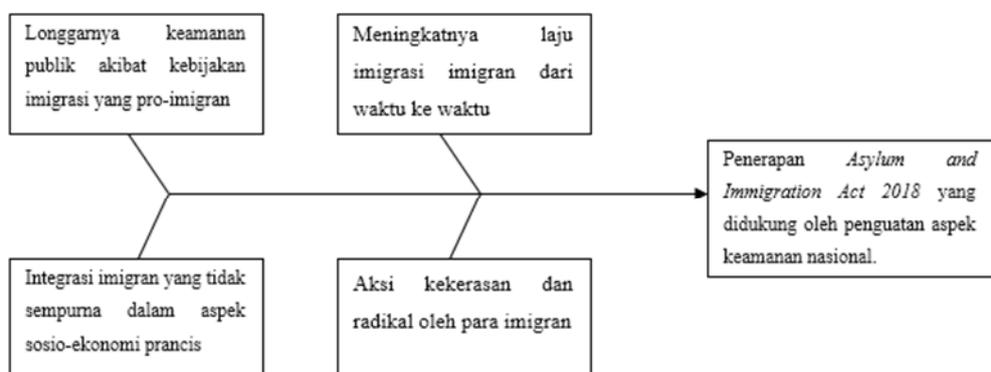
berbeda-beda, dimana terdiri dari dimensi militer, politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan (Stone, 2009). Berdasarkan berbagai penjelasan keamanan nasional diatas, menjadi tepat untuk menggambarkan kebijakan imigrasi Prancis pada masa pemerintahan Emmanuel Macron, yang mana kebijakan tersebut diambil karena bertujuan melindungi kepentingan nasional Prancis dari adanya ancaman internal maupun eksternal.

METODE

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian dengan metode ini bertujuan untuk melihat perilaku orang, peristiwa lapangan, serta kegiatan-kegiatan tertentu secara terperinci dan mendalam (Sugiyono, 2008). Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis pada penelitian ini yaitu dengan studi literatur atau *literature research* dalam mendapatkan data yang dibutuhkan. Data-data dalam penelitian ini berasal dari pengumpulan data-data sekunder yang berupa buku, tesis, skripsi, jurnal, dan artikel yang berasal dari sumber-sumber media terpercaya (Sanapiah, 1992).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan diagram analisa model *fishbone* yang berfungsi untuk mengkategorikan berbagai sebab potensial dan menganalisanya untuk mengetahui detail dari sebuah proses yang ada (Imamoto et al., 2002).

Gambar 1. Pemetaan model *fishbone* proses kausalitas dalam terjadinya penetapan kebijakan imigrasi Prancis di masa Emmanuel Macron



Sumber: Olahan penulis (2022)

Melalui pemetaan *fishbone* di atas, maka dapat dilihat bahwasanya pengetatan kebijakan imigrasi Prancis bukanlah tanpa alasan. Terdapat proses kausalitas yang merupakan gabungan dari beberapa faktor utama, seperti adanya kebijakan imigrasi yang pro-imigran sehingga menyebabkan keamanan nasional yang longgar serta riskan terhadap berbagai ancaman. Fleksibilitas kebijakan tersebut menyebabkan adanya peningkatan laju imigrasi oleh para imigran yang berdampak pada ketidak sempurnaan mereka dalam integrasi sosio-ekonomi dengan masyarakat lokal Prancis. Adanya segregasi dan diskriminasi oleh masyarakat lokal menyebabkan terjadinya berbagai aksi kekerasan yang dilakukan oleh para imigran, dan hal tersebut tentu menjadi ancaman bagi keamanan nasional Prancis. Sebagai akibat dari proses kausalitas yang ada, maka Prancis menerapkan beberapa langkah strategis guna meningkatkan keamanan nasionalnya yakni melalui pengesahan *Asylum and Immigration Act 2018*, serta melakukan berbagai langkah keamanan yang bersifat preventif lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Imigran di Prancis Sebelum Era Presiden Macron

Imigran sendiri telah menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan sosial dan historis dari Prancis. Besaran imigran yang memiliki populasi paling banyak di Prancis berasal dari kaum muslim dimana banyak pendatang yang berasal dari negara-negara Maghribi seperti Aljazair, Tunisia, dan Maroko. Terlebih Prancis juga memiliki rekam jejak kolonialisme di kawasan Afrika Utara, terutama ketika adanya rekonstruksi Prancis setelah Perang Dunia I & II yang merekrut sekitar 70.000 warga Aljazair dan 70.000 warga Maroko sebagai tenaga buruh. Pemerintah Prancis membuka jalur bagi para imigran tersebut agar dapat berkontribusi terhadap pembangunan negara dengan menyediakan fasilitas izin tinggal permanen dan sementara (Guiraudon, 2001). Imigran yang telah merasa sukses akan mengajak sanak keluarganya untuk turut bergabung ke daratan Prancis. Sebagai dampaknya, pada saat ini kurang lebih terdapat sebanyak 15 juta jiwa imigran muslim yang tinggal disana, atau sekitar 10% dari total populasi Prancis (Wicaksono, 2017). Di antara angka tersebut, diperkirakan terdapat sekitar 300.000- 400.000 imigran ilegal yang memasuki teritori Prancis tanpa izin

ataupun memiliki visa yang telah *overstayed* (Pew Research Center, 2019).

Permasalahan tentang imigran sendiri telah menjadi cerita lama dalam kehidupan sosio-eko-politik di Prancis. Pasalnya, Prancis sendiri dalam prakteknya tidak sepenuhnya mengimplementasikan nilai dari semboyan *'Legalite-Egalite-Fraternite'* dalam kebijakan khususnya mengenai permasalahan imigran karena banyak terjadi diskriminasi yang dialami oleh kelompok tersebut terutama yang berasal dari negara-negara Maghribi. Dalam aspek ekonomi, ada ketidakadilan yang mana terdapat beberapa perusahaan yang memberikan tanda pembeda ras dalam berkas lamaran pekerjaan. Secara sosial, masyarakat asli Prancis juga menaruh rasa curiga dan *xenophobic* (terutama pasca kejadian 9/11 di AS) terhadap keberadaan para imigran, yang menyebabkan gagalnya integrasi tatanan sosial (Ayudia & Panggabean, 2009).

Untuk melawan ketidakadilan tersebut, para komunitas imigran di Prancis pun sampai menggelar setidaknya 3 aksi besar dalam rangka untuk menyuarakan hak-hak mereka agar setara dengan masyarakat domestik seperti Sonacotra Rent Strike di tahun 1970-an, Gerakan "Generasi Kedua" di tahun 1980-an, dan juga Gerakan Sans-Papier di tahun 1990-an (Guiraudon, 2001). Faktor lain yang mendasari adanya gerakan tersebut adalah karena para politisi serta *policymaker* di Prancis telah memainkan isu-isu sensitif ancaman mengenai terorisme sehingga membentuk *xenofobia* di Masyarakat. Hal tersebut juga berdampak pada keluarnya Kebijakan Pasqua dan Debré pada tahun 1990an yang bertujuan untuk mewujudkan visi *'immigration zéro'* dengan target untuk membatalkan semua prosedur dan hak-hak sosial para imigran, serta mengontrol jumlah imigran ber-etnis Afrika yang terdapat di Prancis (Hollifield, 2020).

Kegagalan integrasi tersebut juga diperparah dengan kebijakan Prancis pasca insiden 9/11 di masa Presiden Chirac yang mulai melembagakan Islamofobia dalam konstitusi negara. Dalam artian banyak kebijakan negara tersebut bertujuan untuk mendiskreditkan para imigran serta masyarakat muslim yang tinggal disana. Sebagai dampaknya, kohesi sosial juga meningkat dimana pada diantara tahun 2003 hingga 2004 terdapat 182 kasus Islamofobia. Terlebih angka tersebut naik sebesar 110% semenjak adanya insiden Penembakan Charlie Hebdo di tahun 2015 yang menewaskan 12 korban jiwa (Gumilar, 2020).

Kaum imigran muslim Prancis juga akrab dengan rendahnya tingkat pendidikan dan sumber daya manusia, serta kemiskinan. Rata-rata mereka bekerja sebagai buruh kasar, dan rawan dieksploitasi oleh pengusaha-pengusaha asli Prancis yang menginginkan tenaga kerja yang dapat dibayar murah. Hal tersebut semakin menambah jurang disparitas antara imigran dan warga asli Prancis, belum ditambah oleh stigma negatif yang mengaitkan mereka dengan kriminalitas, dan lain sebagainya. Selain itu warga asli Prancis juga menganggap diri mereka lebih superior dari kaum imigran, hal tersebut menyebabkan adanya disintegrasi sosial yang menjadi penghambat bagi terwujudnya asas keadilan sosial di negara tersebut (Wicaksono, 2017).

Salah satu untuk mengurangi angka imigran yang termasuk dalam kategori 'unskilled labor' adalah dengan memberlakukan *Sarkozy Law* pada tahun 2006, yang secara garis besar berisikan tentang kebijakan Prancis untuk memperketat akses masuk imigran asing dengan metode *selective immigration*. Peraturan ini memprioritaskan akses masuk bagi para imigran yang masuk dalam kategori 'high-skilled labor' untuk masuk dalam teritori Prancis serta mendapatkan pekerjaan dalam 10 bidang yang telah ditentukan seperti teknologi informasi, perbankan, medis, hingga jasa (Vickstrom, 2019). Adanya peraturan tersebut merupakan jawaban Prancis untuk mengurangi tingginya angka imigran ilegal, dan sekaligus untuk melindungi ekonomi dalam negeri agar tidak mengulangi kejadian serupa pada tahun 1974 ketika keberadaan para imigran justru menjadi ancaman bagi keamanan dan perekonomian nasional (Borrel, 1999). Adanya berbagai peristiwa ini yang kemudian menjadi cikal bakal ancaman internal dari permasalahan imigran di Prancis, karena menimbulkan instabilitas sosial, sehingga menjadi salah satu alasan Emmanuel Macron menguatkan kebijakan kontrol imigrasinya.

Imigran Ilegal dan Terorisme di Prancis

Imigran merupakan seseorang yang berpindah dari suatu negara ke negara lain, dan dalam klasifikasinya terdiri dari imigran normal, *forced* (dipaksa), dan ilegal. Imigran *forced* merupakan orang-orang yang melakukan imigrasi dengan paksaan yang biasanya dilakukan oleh para kelompok pemberontak, organisasi teroris, ataupun suatu kebijakan negara. Imigran *forced* juga bisa termasuk ke

dalam imigran ilegal jika terdaftar ilegal. Secara jelas, Imigran ilegal merupakan seseorang yang memasuki dan hidup di suatu negara tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditentukan negara tujuan, yang mana didapatkan melalui jalur-jalur ilegal seperti penyelundupan. Imigran ilegal kerap memasuki negara-negara lain ketika negaranya mengalami represi, perang saudara atau terorisme di dalam negeri sehingga menjadi tempat persekongkolan dan sarang para teroris. Fenomena imigran ilegal yang terhubung ke terorisme ini telah dialami oleh Prancis sejak lama, contohnya pada tahun 1990-an, ketika London menjadi pusat penting bagi teroris jihadis dan menjadi gerbang imigran ilegal, sehingga memunculkan stigma/label "Londonistan" karena aksi terorisnya di Prancis (Schmid, 2016).

Imigran ilegal bisa menjadi teroris dan sebaliknya, teroris bisa menjadi imigran yang mana terjadi dalam berbagai cara sebagai berikut (Schmid, 2016): 1) Melalui ajaran *hijrah* (berpindah dari satu negara ke negara lain), kelompok teroris dapat memikat penduduk Eropa terutama diaspora Islam, dilakukan cuci otak sehingga dijadikan teroris dengan label *foreign terrorist fighters* (FTFs); 2) Para teroris *jihadis* yang tidak dapat kembali ke negara asal mereka memutuskan untuk ke negara-negara lain untuk melakukan aksi jihadis-nya, termasuk ke negara-negara Timur Tengah dan Eropa; 3) Para teroris menculik para imigran pekerja dan dipaksa untuk bergabung ke kelompok teroris dan dikirim menjalankan misi ke berbagai negara melalui jalur ilegal; 4) Para imigran pejuang *jihadis* yang telah terlibat dalam tindakan terorisme, termasuk terorisme bunuh diri, melakukan migrasi kembali ke negara asalnya sebagai pengungsi dan melakukan aksi terorisme di negaranya.

Imigran ilegal maupun praktik cuci otak para penduduk Prancis yang berpindah ke negara-negara tempat teroris, menjadi salah satu sumber dari aksi teroris di Prancis. Terdapat banyak kasus dimana para imigran ilegal menjadi pelaku terorisme di Prancis, misalnya pada kasus Charlie Hebdo di tahun 2015, dan yang terbaru yaitu dua serangan pisau yang terjadi di Paris dan Nice masing-masing pada bulan Oktober dan November 2020. Kemudian, untuk aksi cuci otak, pada akhir tahun 2016, terdapat 2.000 warga Prancis yang pindah ke negara-negara konflik (Suriah, Afganistan, Iraq, Iran, Lebanon, dll) yang mana 75% nya

telah bergabung ke ISIS dan 25% nya bergabung ke Jabhat al-Nusra, sehingga menjadi bibit-bibit teroris (Sharma, 2020). Hal ini kemudian menjadi faktor penyebab berbagai aksi teroris di Prancis, yang mana dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. Insiden/Korban Jiwa/Koran Luka-Luka dari Serangan Teroris-Islamist di Prancis Tahun 2015-2020



Sumber: Sharma (2020)

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 hingga 2020, Prancis telah mengalami 59 serangan teroris yang mana menelan korban jiwa sebanyak 285 orang, dan lebih dari 900 orang luka-luka. Sekitar 40 dari total 59 serangan terjadi dari 2015 hingga 2017 yang mana merupakan tahun puncak dari ISIS, serta para pelaku terdiri dari imigran ilegal dan FFTs. Akan tetapi semenjak Emmanuel Macron menjabat pada tahun 2017, jumlah kasus dan korban dari serangan terorisme di Prancis mengalami pengurangan signifikan terutama dalam jatuhnya korban jiwa dan luka-luka. Hal ini kemudian menjadi salah satu hal yang menarik pada masa pemerintahan Emmanuel Macron yang mana memberlakukan kebijakan kontrol imigrasi yang ketat dengan tujuan memberantas para teroris yang masuk melawati jalur-jalur ilegal (imigran ilegal). Oleh karena itu, penelitian ini pada sub bab selanjutnya akan membahas kebijakan kontrol imigrasi Prancis pada masa Emmanuel Macron.

Kebijakan Kontrol Imigrasi dan Implikasinya terhadap Keamanan Nasional Prancis

Berkaca dari Krisis Migran yang dialami oleh Prancis serta Uni Eropa (UE) yang dialami dalam beberapa tahun terakhir, membuat keputusan untuk

memberlakukan kontrol imigrasi dengan cara mengontrol perbatasan negara secara ketat merupakan solusi yang jauh lebih realistis. Hal tersebut dikarenakan cara-cara lama seperti detensi dan deportasi merupakan solusi yang dapat dikatakan kurang membuahkan kontribusi untuk mengurangi angka imigran secara signifikan. Adanya isu-isu terkait dengan imigran yang beredar selama ini menyebabkan adanya diskursus diantara para politisi dan *policymaker*, terlebih, adanya Perjanjian Schengen yang diratifikasi oleh negara-negara anggota UE termasuk Prancis, yang mana menitikberatkan pada kebebasan arus barang, jasa, dan kebebasan bergerak bagi para individu (Bigo, 2009).

Semula kebijakan yang berlandaskan keterbukaan tersebut merupakan salah satu bentuk dari keberhasilan regionalisme dengan berhasil memadukan aspek HAM. Akan tetapi, semenjak banyak negara anggota UE memiliki rekam jejak kolonialisme (terutama di Afrika) seperti Prancis, maka imigrasi yang dilakukan oleh individu dari negara jajahan pada negara induk masih kerap dilakukan bahkan hingga keduanya sudah menjadi *sovereign states*. Contohnya yaitu relasi antara Prancis dengan Senegal yang merupakan eks-koloninya dalam bidang imigrasi, dimana pada awalnya kedua negara saling bekerjasama, kemudian menjadi perenggangan.

Perubahan hubungan Prancis dan Senegal tersebut terlihat pada tahun 1960-an, ketika perekonomian Senegal dilanda krisis yang membuat banyak warganya melakukan imigrasi ke Prancis. Adanya eksodus imigran Senegal pada kurun 1960-1970an membuat Prancis harus memberlakukan penutupan perbatasan. Permasalahan tersebut berdampak pada munculnya banyak kebijakan kontrol imigrasi hingga pada beberapa tahun terakhir agar tetap dapat mempertahankan kepentingan serta keamanan nasionalnya (Mezger & González-Ferrer, 2013).

Hal tersebut juga berimbas pada adanya visi *immigration zéro* ataupun berbagai kebijakan restriktif lain, yang mana semuanya mengarah pada prioritas kepentingan serta keamanan nasional daripada harus mendahulukan norma-norma internasional. Pada poin ini, negara akan menempatkan perspektif mereka kedalam perspektif mereka sendiri, yang mana menitikberatkan akan kepentingan akan keamanan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang terancam oleh ancaman dari para imigran (Appadurai, 1998). Hal tersebut akan membuat suatu keadaan

yang disebut sebagai ‘*insecurity continuum*’ dimana suatu negara merasa terancam oleh ketidakamanan dalam skala global sehingga memaksa polisi, tentara, dan dinas intelijen untuk bekerja sama baik di tingkat nasional dan internasional (Bigo, 2002). Insecuritas dapat dilihat melalui gambaran bahwa imigran merupakan salah satu faktor yang dapat mengancam kepentingan serta keamanan nasional suatu negara.

Selain itu, tak bisa dipungkiri bahwa kejadian 9/11 di AS juga turut berkontribusi pada kontrol imigrasi yang dilakukan oleh negara-negara UE termasuk Prancis, termasuk dalam pengembangan teknologi dalam bidang imigrasi. Adanya sistem biometrik yang dapat melacak serta mengidentifikasi para pendatang yang akan masuk dalam kawasan Schengen yang bertujuan untuk mempermudah proses pemantauan dan pengendalian para imigran (Bigo, 2009). Terlebih, adanya penyaringan terhadap ideologi Islam radikal seperti sertifikasi imam juga menjadi salah satu justifikasi atas diberlakukannya sistem tersebut, yang juga menjadi langkah preventif untuk mencegah adanya doktrinisasi kepada masyarakat domestik (Deutsche Welle, 2022). Hal tersebut dipandang sebagai langkah yang jauh lebih efektif daripada tindakan konvensional lain yang dilakukan oleh Prancis dalam beberapa tahun belakangan (British Broadcasting Corporation, 2021; Reuters, 2018).

Berbagai upaya yang dilakukan tersebut membentuk ‘Tembok Eropa’ yang bertujuan untuk melindungi UE dari serbuan migran. Adanya insecuritas terhadap para imigran tersebut juga mempengaruhi banyak partai politik, terutama yang berhaluan kiri, untuk mendukung langkah yang lebih restriktif dalam menanggapi permasalahan imigran yang kian mengkhawatirkan. Terlebih peran media lokal dan internasional yang menggambarkan imigran sebagai ‘kriminal’, ‘orang ilegal’, bahkan hingga ‘pengemis yang memanfaatkan hak sosial negara dan tidak memiliki kontribusi’ menjadi mempengaruhi cara pandang masyarakat domestik terhadap keberadaan migran (Valluy, 2008). Rentetan siklus tersebut juga menandakan bahwa banyak negara-negara di kawasan UE masih mengalami ‘*post 11-September syndrome*’ yang memunculkan insecuritas diberbagai bidang vital seperti keamanan dan sosial (Tsoukala, 2008). Insecuritas terhadap para imigran yang berawal dari budaya dan keadaan sosial kemudian mulai berkaitan

dengan faktor ancaman eksternal yaitu kehadiran teroris, sehingga para imigran berpotensi melakukan tindakan terorisme, yang mana menjadi salah satu penyebab Emmanuel Macron menguatkan kontrol imigrasi Prancis.

Kebijakan Imigrasi Prancis pada Masa Pemerintahan Emmanuel Macron

Kebijakan imigrasi Prancis pada masa Presiden Emmanuel Macron pada awalnya bersifat pro imigran dan para pencari suaka. Hal tersebut, dikarenakan janjinya pada masa kampanye pemilihan presiden Prancis tahun 2017 (Wolf, 2017). Macron dalam kampanyenya juga mengatakan bahwa ingin membuat Prancis lebih globalis, dalam artian kebijakan internasional Prancis akan lebih moderat, salah satunya yaitu dengan tetap menerima para imigran yang datang ke Prancis (Sihite, 2017). Pada interview dengan *Reforme*, Macron mengatakan bahwa imigrasi merupakan hal yang bagus karena akan berdampak positif ke ekonomi, sosial, dan budaya (Bréville, 2017).

Macron terbuka terhadap para imigran, dan juga berjanji akan membuat proses permohonan suaka dan mendapatkan kewarganegaraan menjadi lebih cepat. Dalam pidatonya pada 26 September 2017, Macron juga menyerukan kepada negara-negara Eropa untuk menyambut baik para imigran dan memulangkan para imigran yang belum memenuhi syarat untuk meningkatkan kontrol imigran (ELYSEE, 2017). Emmanuel Macron aktif dalam memperjuangkan hak-hak para imigran dan pencari suaka, akan tetapi hal tersebut berubah seiring berjalannya tahun dengan ditandai adanya berbagai penyerangan oleh imigran di Prancis.

Terdapat beberapa peristiwa penyerangan oleh imigran di Prancis yang terlihat kembali di rentan akhir tahun 2017 hingga 2018. Berdasarkan data dari Statista di tahun 2018, penyerangan terorisme di Prancis memiliki keterkaitan dengan para imigran di Prancis, hal ini dilihat dari adanya persepsi warga Prancis sebanyak 53% setuju bahwa imigran berkaitan dengan penyerangan teroris (Statista Research Department, 2021). Data tersebut didukung oleh banyaknya kasus penyerangan dan terorisme yang pelakunya adalah imigran baik legal maupun imigran ilegal, pada tahun 2017 terdapat 12 kasus penyerangan dan tahun 2018 terdapat 9 kasus penyerangan (Sharma, France & Austria Terror Attacks 2020: The Looming Shadow of Islamic Terrorism over Europe, 2020).

Melihat kondisi tersebut, terdapat penguatan kebijakan terhadap imigran dan pencari suaka di Prancis oleh Emmanuel Macron, meskipun tidak sesuai dengan janji Macron pada kampanyenya yang akan menyelesaikan permasalahan imigran dengan menjunjung tradisi hak asasi manusia (Beardsley, *Macron's Immigration Plan For France*, 2018). Terdapat berbagai kebijakan imigrasi yang diambil oleh Emmanuel Macron yaitu mengesahkan *Asylum and Immigration Act di tahun 2018*; Memperkuat perbatasan Prancis; dan pembersihan camp para imigran di Prancis.

- **Mengesahkan *Asylum and Immigration Act 2018***

Pada masa Pemerintahan Emmanuel Macron terdapat penetapan kebijakan imigrasi dan suaka yaitu dengan disahkannya undang-undang *asylum and immigration act 2018*. Terdapat berbagai perubahan dari undang-undang tersebut dibandingkan versi sebelumnya, yang mana salah satu perubahan yang paling terlihat yaitu mengenai waktu tunggu deportasi para pencari suaka yang gagal mendapatkan suaka dapat ditahan hingga 90 hari, yang mana meningkat dua kali lipat dari versi sebelumnya yang hanya 45 hari. Kemudian terdapat perubahan batas waktu untuk mengajukan permintaan suaka atau mengajukan banding atas penolakan yang dipersingkat hingga hanya 90 hari, yang mana versi sebelumnya memiliki waktu yang lebih lama yaitu 120 hari dan dua minggu untuk mengajukan banding atas penolakan permintaan suaka (British Broadcasting Corporation, 2018).

Pemerintah Prancis dalam website resminya menjelaskan bahwa disahkannya undang-undang ini merupakan bagian dari 5 fokus kebijakan imigrasi Prancis yaitu: 1) Lebih mengontrol arus migrasi di tingkat Eropa dan internasional; 2) Memastikan bahwa hak suaka sepenuhnya efektif kembali, dengan meningkatkan pemrosesan permintaan dan kondisi penerimaan; 3) Mengimplementasikan kebijakan yang kredibel dan efektif mengenai imigrasi dan deportasi ilegal; 4) Melaksanakan reformasi kebijakan yang terintegrasi secara luas; 5) Menarik lebih banyak bakat dan keterampilan tenaga imigran (Gouvernement France, 2018). Berdasarkan 5 fokus kebijakan tersebut, juga terdapat tujuan dari disahkannya undang-undang ini meningkatkan perlindungan terhadap individu, menyesuaikan dengan prosedur dan praktik

hukum Eropa, dan mengadaptasikan hukum dengan realitas operasional. Lebih lanjut, alasan dari adanya undang-undang ini yaitu untuk mengurangi permintaan suaka yang melebihi kuota penerimaan hingga 100.000 permintaan, menghindari konflik bersenjata di dalam negeri, dan memberantas imigran ilegal (Gouvernement France, 2018).

Meskipun tujuan dari disahkannya undang-undang ini terkesan positif, namun tidak terlepas dari adanya berbagai kritik terhadapnya. Misalnya seperti respon dari *Human Rights Watch* yang mana mengatakan bahwa kebijakan memperpendek batas waktu permohonan suaka dapat berdampak buruk terhadap para pencari suaka yang kemungkinan besar melewati batas waktu permohonan suaka. Direktur Kelompok Prancis Bénédicte Jeannerod juga mengatakan *asylum and immigration act 2018* memiliki tujuan sebenarnya yaitu pengurangan akses terhadap perlindungan imigran dan pencari suaka (British Broadcasting Corporation, 2018).

- **Memperkuat Penjagaan Perbatasan**

Selain mengesahkan *asylum and immigration act 2018*, Presiden Emmanuel Macron juga mengambil kebijakan untuk semakin memperketat garis perbatasan Prancis dengan negara lain, serta memperketat penjagaan terhadap akses/jalur-jalur masuknya imigran ilegal. Presiden Macron telah meningkatkan penjagaan imigrasi dengan menggunakan polisi maupun tentara, diantaranya yaitu di Calais yang mana merupakan wilayah perbatasan dengan Inggris. Presiden Macron memutuskan untuk melipatgandakan jumlah polisi dan pasukan tentara di kontrol perbatasan Prancis dari yang awalnya hanya 2.400 personil kemudian menjadi 4.800 personil (Corbet, 2020). Penambahan personil di perbatasan ini merupakan upaya untuk melawan berbagai kegiatan imigrasi ilegal dan penyelundupan dari luar Prancis.

Kebijakan ini juga diambil karena semakin banyaknya imigran ilegal yang menyebrangi perbatasan dan ingin masuk ke Prancis, seperti antara perbatasan Prancis-Spanyol pada tahun 2020 menangkap 11.200 orang imigran ilegal, yang mana meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya 5.500 orang. Selain itu, adanya kejahatan terorisme yang berasal dari kegiatan migrasi ilegal juga merupakan salah satu alasan diperkuatnya perbatasan Prancis (Corbet, 2020).

Prancis pada masa Emmanuel Macron juga melakukan kerjasama penguatan perbatasan dengan negara-negara lain untuk memerangi permasalahan imigran ilegal. Pada agustus 2020 Prancis dan Italia membentuk kerjasama yang lebih erat di bidang penjagaan perbatasan yang khusus mengatasi permasalahan jaringan pengungsi, imigran ilegal dan penyelundup manusia. Kerjasama ini berfokus beroperasi pada jalur laut Mediterania dan laut Afrika utara yang mana menuju ke garis pantai Italia. Menteri Dalam Negeri Prancis Gérald Darman menjelaskan bahwa kerjasama ini menjadi sangat penting karena memerangi penyeberangan perbatasan populasi imigran ilegal yang berasal dari wilayah Ventimiglia di sisi Italia hingga wilayah Menton di sisi Prancis (Bellamy, 2020).

• **Pembersihan Kamp Imigran di Prancis**

Pada masa pemerintahan sebelumnya di tahun 2016, sudah dilakukan pembersihan kamp-kamp imigran salah satunya yang terbesar yaitu di Calais. Kamp imigran di Calais disebut dengan 'Jungle' karena merupakan daerah yang kumuh dan penuh dengan kamp para imigran. Selain itu, kamp *Jungle* di Calais juga telah lama menjadi masalah dalam hubungan dengan Inggris karena merupakan titik penghubung para migran untuk ke Inggris. Akan tetapi setelah pembersihan, masih terdapat ratusan imigran tetap berada di Calais dan berusaha membangun kembali kamp-kamp mereka (Voice of America, 2018).

Melihat permasalahan tersebut, pada masa Pemerintahan Emmanuel Macron menguatkan kebijakan imigrasi yang mana terlihat dari adanya pembersihan rutin kamp para imigran. Hal ini bermula dari statement Macron dalam pidatonya di Calais, 16 Januari 2018, yang mana ia mengatakan bahwa Prancis tidak akan lagi mengizinkan kamp-kamp imigran. Macron menjanjikan dibentuknya kebijakan imigrasi yang lebih tertib tanpa toleransi (zero tolerance) terhadap kamp-kamp imigran seperti *Jungle*. Macron berkomitmen menyelesaikan masalah imigran terutama kamp-kamp imigran ilegal yang menyebabkan banyak masalah di kota-kota Prancis, seperti aksi kejahatan, seperti halnya terdapat berbagai kasus kekerasan dan pembajakan dengan senjata di kamp imigran di Caen, Prancis (Piotrowska-Pelka, 2018).

Berdasarkan laporan dari Guardian di tahun 2019, Pemerintahan Macron dalam 4 tahun terakhir telah membersihkan 30 kamp imigran di Paris dan

sekitarnya, meskipun setelah dilakukan pembersihan, sebanyak ribuan imigran tetap kembali dan tidur di jalanan (Chrisafis, 2019). Salah satu pembersihan kamp imigran terbesar di tahun 2020 yaitu pembersihan kamp imigran baru di Calais yang dihuni oleh lebih dari 600 imigran, seperti pada gambar berikut:

Gambar 3. Pembersihan Kamp Imigran Baru di Calais



Sumber: Wallis (2020)

Lebih dari 30 bus digerakan untuk memindahkan kurang lebih 600 imigran di kamp Calais ke *welcome center*, serta 34 imigran lainnya ditahan karena ketidaklengkapan prosedur. Pembersihan kamp ini rutin dilakukan sejak pembersihan ‘Jungle’ akan tetapi para imigran terus berjalan ke Calais dan garis pantai sekitarnya untuk mendirikan tenda sehingga dapat mencoba menyeberangi Selat menuju ke Inggris baik dengan perahu, bersembunyi di mobil, truk atau di kereta api, bahkan berenang (Wallis, 2020). Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa kebijakan imigrasi Prancis pada masa Macron semakin tegas dan ketat, dalam memberantas imigran ilegal yang membuat berbagai masalah.

***National Security* dalam Kebijakan Kontrol Imigrasi Era Emmanuel Macron**

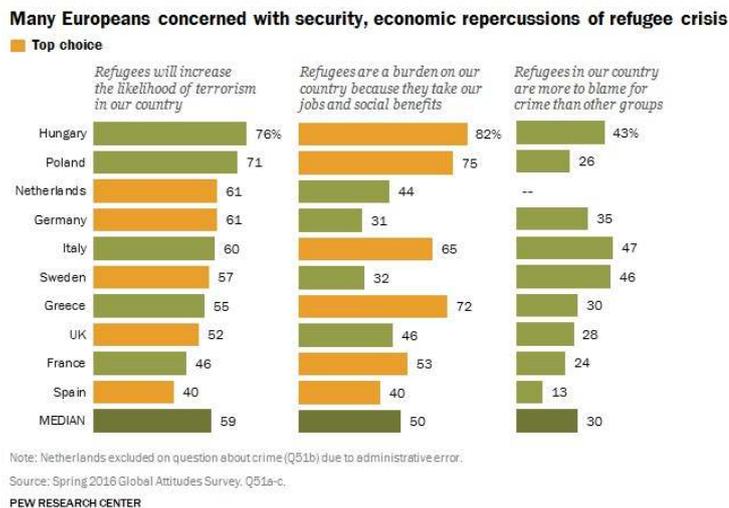
Sebelum masuk ke analisa kebijakan kontrol imigrasi Emmanuel Macron, kita harus mengetahui ancaman-ancaman yang dihadapi Prancis berdasarkan Konsep *National Security*. Terdapat ancaman internal dan eksternal pada konsep *national security*, yang mana menjadi alasan pengambilan kebijakan suatu negara. Emmanuel Macron mengambil kebijakan untuk mempertahankan negaranya dilatarbelakangi dari adanya ancaman internal yaitu instabilitas sosial yang disebabkan oleh adanya stigma negatif dan diskriminasi sosial antara masyarakat

asli Prancis dengan imigran yang tinggal disana(Wike, Stokes, & Simmons, 2016). Hal ini menyebabkan Prancis rawan akan gejolak sosial dan berbagai ancaman lain yang dapat ditimbulkan seperti terorisme. Di sisi lain, Prancis juga menghadapi ancaman eksternal yaitu adanya persebaran imigran ekstrimis terorisme di berbagai negara yang berpotensi menjadi asal dari aksi-aksi terorisme di Prancis (Bensman, 2019).

• **Ancaman Internal**

Krisis pengungsi yang berkaitan erat dengan imigran di Eropa menciptakan instabilitas sosial di Prancis yang mana menjadi ancaman internal bagi Prancis. Hal tersebut terlihat dari adanya stigmatisasi dan diskriminasi terhadap imigran dan pengungsi di Prancis. Stigma negatif terhadap imigran dan pengungsi terdiri dari adanya ketakutan masyarakat Prancis akan tindakan terorisme dan kejahatan lainnya yang muncul dari keberadaan para imigran ilegal. Selain itu juga adanya ketakutan akan kekurangan lapangan pekerjaan bagi warga Prancis yang diambil oleh para imigran dan pengungsi. Lebih detail dapat dilihat dari survei oleh Pew Research Center di tahun 2016 berikut ini:

Gambar 4. Survei Pemikiran Masyarakat Eropa terhadap Pengungsi/Imigran



Sumber: Wike, Stokes, & Simmons (2016)

Pada survei di atas, dapat diketahui bahwa hampir setengah dari warga Prancis yaitu sebanyak 46% berpendapat bahwa pengungsi dan imigran akan meningkatkan kemungkinan serangan teroris di Prancis. Selain itu, terdapat 53% warga Prancis berpendapat bahwa pengungsi dan imigran merupakan beban bagi ekonomi masyarakat karena mengambil lapangan pekerjaan dan fasilitas sosial

yang seharusnya dinikmati oleh warga Prancis. Kemudian, terdapat 24% berpendapat pengungsi dan imigran merupakan kelompok yang lebih dapat disalahkan atas kejahatan lain yang terjadi di Prancis (Wike, Stokes, & Simmons, 2016). Berdasarkan data-data tersebut, meskipun tidak setinggi negara-negara Eropa yang lainnya, tetapi warga Prancis terpecah belah dalam menanggapi isu imigran dan pengungsi, yang mana membuat disintegrasi sosial di Prancis.

Stigma negatif terhadap imigran dan pengungsi/pencari suaka di Prancis yang telah dijelaskan, semakin diperkuat dengan adanya serangan-serangan, kejahatan, dan tindakan teroris yang dilakukan oleh para imigran dan pengungsi. Salah satu contohnya yaitu pada Februari 2017, imigran asal Mesir melukai dan menyerang salah satu tentara Prancis dengan menggunakan parang di dekat Mueum Louvre di Paris. Kemudian, adanya penusukan hingga kematian dua wanita oleh imigran Tunisia di Marseille. Berbagai aksi teroris di Prancis yang dilakukan oleh imigran tersebut mayoritas berkaitan dengan kelompok ISIS (U.S. Embassy in France, 2017).

Stigma negatif terhadap imigran dan pengungsi diikuti dengan adanya tindakan diskriminasi warga Prancis terhadapnya. Berdasarkan data di tahun 2018, dari 300 imigran di Prancis, sebanyak 75% pernah mengalami pelecehan secara verbal oleh warga Prancis. Kemudian, terdapat 5% yang menyatakan pernah mengalami pelecehan seksual dari warga Prancis, serta sisanya yaitu kekerasan secara fisik lainnya (Townsend, 2018). Terdapat juga perilaku diskriminasi oleh polisi Prancis, yang mana pada tahun 2018, terdapat sepertiga dari 283 responden imigran mengalami kekerasan oleh polisi (33,8%). Mayoritas responden menyatakan bahwa mereka ditembak dengan gas air mata oleh polisi (86%), kemudian sebanyak 28% mengalami pelecehan verbal dan lebih dari 20% kekerasan fisik (Stanton, 2018).

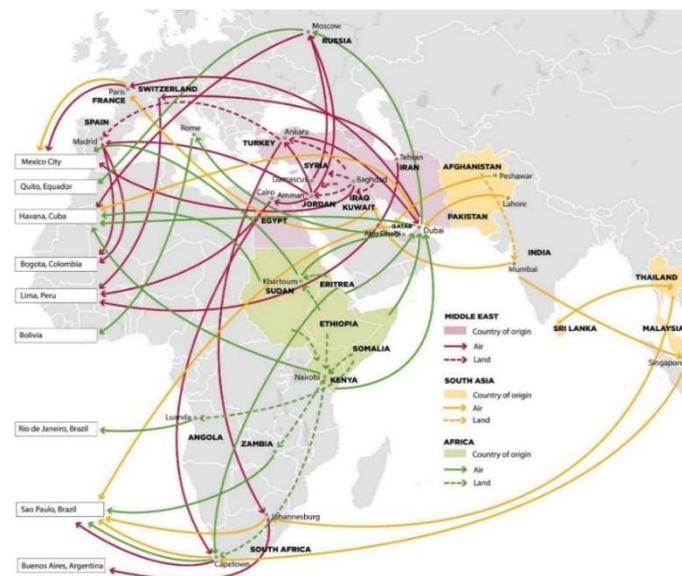
Melihat berbagai penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat jurang pemisah antara imigran dan warga Prancis, sehingga integrasi sosial susah dicapai. Diskriminasi dan tindakan kejahatan oleh imigran di berbagai kota di Paris merupakan ancaman internal yang harus segera diselesaikan. Hal tersebut menjadi penting karena mempengaruhi keselamatan warga Prancis itu sendiri, serta mengancam hak kemanusiaan bagi para imigran. Oleh karena itu,

Pemerintah Emmanuel Macron merespon dengan mengeluarkan kebijakan kontrol imigrasi untuk mencapai kepentingan nasional Prancis yaitu menciptakan stabilitas sosial dan keamanan.

• Ancaman Eksternal

Prancis sejak lama telah menghadapi ancaman eksternal yaitu adanya migrasi terorisme yang datang dari perbatasan dengan negara-negara lain terutama dengan negara-negara yang berpotensi menjadi asal dari teroris. Migrasi teroris yang terjadi ini menjadi ancaman karena para teroris masuk ke Prancis sebagai imigran atau pengungsi/pencari suaka, yang kemudian melancarkan aksi serangan di berbagai kota di Prancis. Migrasi imigran yang berasal dari negara tempat teroris secara lebih detail, dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 5. Peta Jalur Perpindahan Imigran dari Negara Tempat Teroris Beroperasi



Sumber: Bensman (2019)

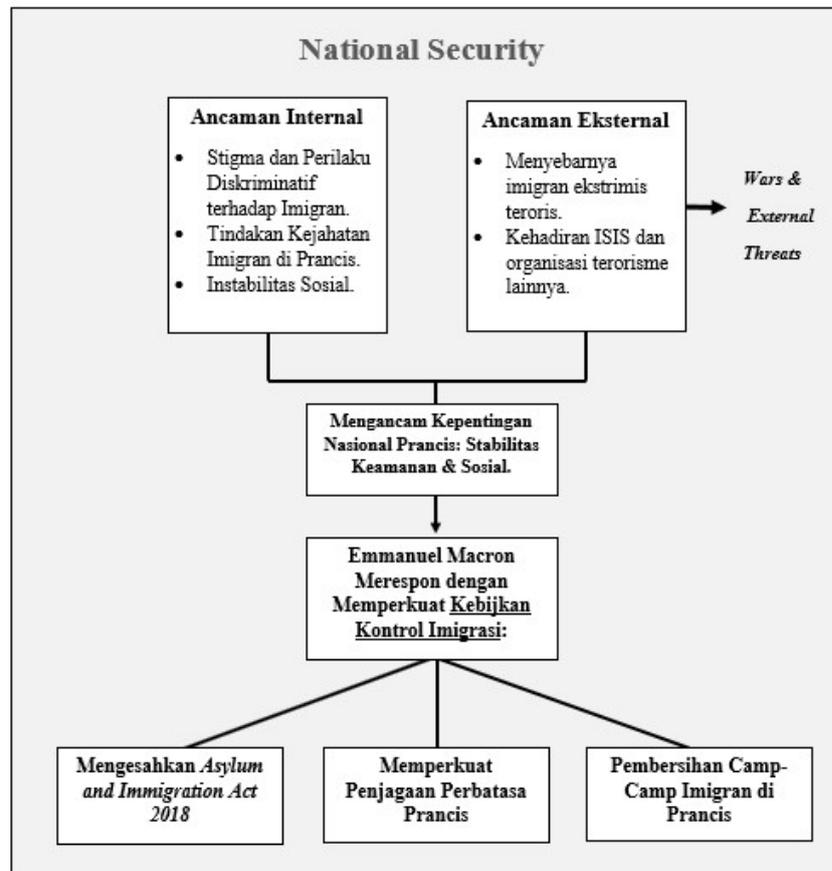
Berdasarkan gambar di atas, Prancis menjadi salah satu negara yang menjadi tempat persinggahan imigran yang berasal dari negara-negara tempat organisasi teroris seperti Iraq, Iran, dan negara timur tengah lainnya. Hal ini semakin menjadi ancaman dengan banyaknya persebaran imigran ekstrimisme. Terlihat pada data antara Januari 2014 hingga Januari 2018, terdapat 104 orang ekstremis Islam/Jihadis yang memasuki Eropa melalui jalur perbatasan laut dan darat eksternal. Dari 104 orang tersebut berpartisipasi dalam serangan terorisme yang diselesaikan, digagalkan, ataupun ditangkap karena kejahatan

lainnya (Bensman, 2019).

Para imigran teroris ini masuk ke negara-negara melalui jalur migrasi gelap sehingga dapat dikatakan sebagai imigran ilegal. Selain itu, mayoritas dari teroris imigran Islam ini berafiliasi dengan ISIS dan kelompok teroris lainnya seperti Jabhat al Nusra, Ahrar al Sham, Taliban, dan lain-lain, yang mana berasal dari Suriah, Irak, Afrika Utara dan Asia Selatan (Bensman, 2019). Kaitan antara kasus terorisme, imigran ilegal, dan negara di timur tengah, menguatkan stigma di Eropa bahwa terorisme cenderung dilakukan oleh imigran dengan latarbelakang ekstrimisme islam (Emmerson, 2016). Prancis yang merupakan negara dengan populasi muslim yang cukup banyak menjadi lebih berpotensi menjadi tempat tumbuhnya jaringan terorisme (Bell, 2015). Kondisi tersebut semakin menggambarkan ancaman eksternal yang dihadapi Prancis yang mana tidak hanya mengancam keselamatan tetapi juga merupakan ancaman terhadap kedaulatan (stabilitas keamanan dan sosial) Prancis.

Setelah mengetahui ancaman internal dan eksternal, selanjutnya yaitu memasuki analisis terhadap proses implementasi kebijakan penguatan kontrol imigrasi dari Pemerintahan Emmanuel Macron. Pada penelitian ini, Konsep Kebijakan Kontrol Imigrasi dari Eytan Meyers akan mendukung Konsep *National Security* dalam menjelaskan proses terbentuknya kebijakan imigrasi Macron. Sesuai dengan penjelasan Eytan Meyers (2004), kebijakan imigrasi Macron termasuk bersifat restriktif karena membatasi kuantitas/jumlah imigran dan pencari suaka yang masuk ke Prancis. Selain itu juga membatasi kriteria dan tipe imigran yang mana berasal dari negara-negara berkonflik atau merupakan sarang teroris, sehingga mengetatkan pemeriksaan terhadapnya (Corbet, 2020). Terpenuhinya kriteria tersebut menjadi tanda bahwa Prancis tidak lagi menggunakan kebijakan imigrasi yang liberal, seperti pada masa awal Pemerintahan Macron, karena adanya ancaman internal dan eksternal, sehingga membuat Macron merubah kebijakannya. Secara lebih jelas, pembentukan dan implementasi kebijakan imigrasi Macron dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 6. *Mapping* Kebijakan Penguatan Kontrol Imigrasi Emmanuel Macron dalam Konsep *National Security*



Sumber: Olahan Penulis (2022)

Berdasarkan gambar 6, dapat diketahui bahwa konsep kebijakan kontrol imigrasi tercakup dalam penjelasan ancaman eksternal dari konsep *national security*, yang mana terdapat faktor *Wars and eksternal threats* (Peperangan dan ancaman dari luar). Faktor ini menjelaskan bahwa kebijakan imigrasi suatu negara dapat berubah ketika adanya situasi peperangan atau ancaman berbahaya lainnya yang datang dari luar (Meyers, 2004). Dalam kasus Prancis, terdapat berbagai negara luar yang berkonflik seperti perang saudara dan wilayah teroris, seperti Iraq, Iran, dan negara-negara timur tengah lainnya. Hal ini menjadikan Prancis lebih menaruh kewaspadaan terhadap imigran-imigran yang datang dari negara tersebut, karena merasa terancam dengan adanya potensi terorisme dari para imigran tersebut. Selain itu, adanya kehadiran ISIS dan organisasi teroris lainnya juga menjadi ancaman eksternal, karena ideologi-ideologi yang disebarkan kerap masuk ke dalam kalangan imigran, sehingga dapat melakukan

tindakan-tindakan kriminal di negara yang dimasukinya (U.S. Embassy in France, 2017).

Berbagai ancaman yang dihadapi Prancis inilah yang kemudian membuat Macron membentuk kebijakan kontrol imigrasi yang restriktif dengan terdiri dari peresmian undang-undang *asylum and immigration act 2018*, penguatan penjagaan perbatasan, dan pembersihan kamp imigran ilegal. Dibalik kebijakan tersebut terdapat kepentingan nasional dari Prancis yaitu ingin mencapai stabilitas sosial dan keamanan. Keadaan sosial di Prancis mengalami guncangan dengan adanya berbagai aksi terorisme, sehingga menimbulkan instabilitas sosial di Masyarakat, hal ini kemudian juga menyebabkan instabilitas keamanan di Prancis. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah tidak tahu kapan para imigran ekstremis teroris ini melakukan aksi kejahatan, sehingga masyarakat selalu dibebani dengan rasa was-was ketika hidup bersama para imigran (Wike, Stokes, & Simmons, 2016). Oleh karena itu, demi mencapai stabilitas sosial dan keamanan, Emmanuel Macron memutuskan menguatkan kebijakan kontrol imigrasi Prancis, dengan harapan dapat menurunkan kasus kejahatan dan terorisme oleh para imigran.

KESIMPULAN

Kebijakan kontrol imigrasi pada Pemerintahan Emmanuel Macron yang restriktif merupakan upaya preventif untuk mencapai keamanan nasional dari ancaman teroris imigran yang muncul melalui jalur-jalur migrasi ilegal. Emmanuel Macron selaku aktor pengambil kebijakan Prancis, telah memahami dengan baik ancaman internal maupun eksternal dari krisis imigran yang dihadapi. Akan tetapi, meskipun kebijakan imigrasi Macron berdampak positif dalam mengurangi angka terorisme di Prancis, tetapi tidak terlepas dari kritik, yang mana diantaranya yaitu kritik terhadap kurangnya keprihatinan Pemerintah Prancis akan hak-hak asasi manusia dari para imigran. Selain itu, terdapat kritik dari banyaknya tindakan diskriminatif yang diterima imigran di Prancis, serta akses terhadap kebutuhan sehari-hari, sehingga masih menyebabkan instabilitas sosial di Prancis. Penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan, sehingga peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya agar berfokus mengkaji dampak dari kebijakan kontrol imigrasi restriktif Pemerintahan Emmanuel Macron di Prancis hingga

periode kedua jabatannya, guna mendapatkan analisis yang lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alex P. Schmid, 2016, "Links between Terrorism and Migration: An Exploration", ICCT Research Paper, International Centre for Counter-Terrorism, diakses melalui Schmid, A. P. (2016). Links between Terrorism and Migration: An Exploration. ICCT Research Paper. From <https://icct.nl/app/uploads/2016/05/Alex-P.-Schmid-Links-between-Terrorism-and-Migration-1.pdf>
- Appadurai, A. (1998). Dead Certainty: Ethnic Violence in the Era of Globalization. *Development and Change*, 29(4), 905–925. <https://doi.org/10.1111/1467-7660.00103>
- Ayudia, S. D., & Panggabean, S. R. (2009). Kegagalan Model Integrasi Imigran Di Prancis. Universitas Gajah Mada. Retrieved from <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/121002>.
- Baylis, J., & Smith, S. (2001). *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. United Kingdom: Oxford University Press.
- Beardsley, E. (2018, Januari 27). Macron's Immigration Plan For France. Retrieved from NPR: <https://www.npr.org/2018/01/27/581268991/macrons-immigration-plan-for-france>
- Bell, D. A. (2015). The French Dilemma. *Dissent*, 62(2), 119–126. <https://doi.org/10.1353/dss.2015.0032>
- Bellamy, D. (2020, Agustus 1). France and Italy agree to unify border forces to combat people smuggling. Retrieved from Euronews: <https://www.euronews.com/2020/08/01/france-and-italy-agree-to-unify-border-forces-to-combat-people-smuggling>
- Bensman, T. (2019). *Data: Terrorist Migration Over European Borders (2014-2018)*. Washington DC: Center for Immigration Studies. Retrieved from <https://cis.org/Report/Terrorist-Migration-Over-European-Borders>
- Bigo, D. (2002). Security and Immigration: Toward a Critique of the Governmentality of Unease. *Alternatives: Global, Local, Political*, 27(1_suppl), 63–92. <https://doi.org/10.1177/03043754020270S105>
- Bigo, D. (2009). Immigration controls and free movement in Europe. *International Review of the Red Cross*, 91(875), 579–591. <https://doi.org/10.1017/S1816383109990385>
- Borrel, C. (1999). Immigration, emploi et chômage : un état des lieux empirique et théorique. <https://www.gisti.org/doc/presse/1999/cerc/dossier.pdf>
- Bréville, B. (2017, April 2). French left has no policy on immigration. Retrieved from *Le Monde diplomatique*: <https://mondediplo.com/2017/04/02france-immigration>
- British Broadcasting Corporation. (2018, April 23). France approves controversial immigration bill. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/news/world-europe-43860880>
- British Broadcasting Corporation. (2020, November 7). Serangan di Prancis: Macron menyerukan reformasi kebijakan perbatasan Uni Eropa. Retrieved

- from British Broadcasting Corporation:
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54835754>
- Cerahwati, N. (2018). Keberhasilan Emmanuel Macron Mengatasi Isu Imigran Dalam Pemilihan Presiden Prancis Tahun 2017. Skripsi. Retrieved from <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/20185>
- Chrisafis, A. (2019, November 7). French police begin clearing makeshift migrant camp in Paris. Retrieved from The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/2019/nov/07/french-police-begin-clearing-makeshift-migrantcamp-paris>
- Corbet, S. (2020, November 5). France reinforcing its border controls following attacks. Retrieved from CTV News: <https://www.ctvnews.ca/world/france-reinforcing-its-border-controls-following-attacks-1.5176181>
- Deutsche Welle. (2022). Austria calls for European register of Muslim imams. DW. <https://www.dw.com/en/austria-calls-for-european-register-of-muslim-imams/a-56114597>
- ELYSEE. (2017, September 26). President Macron gives speech on new initiative for Europe. Retrieved from ELYSEE: <https://www.elysee.fr/en/emmanuel-macron/2017/09/26/president-macron-gives-speech-on-new-initiative-for-europe>
- Emmerson, B. (2016). Promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism. New York: The United Nations.
- Gouvernement France. (2018). Asylum and Immigration. Retrieved from Gouvernement France: <https://www.gouvernement.fr/en/asylum-and-immigration>
- Guiraudon, V. (2001). Immigration Policy in France. Brookings. <https://www.brookings.edu/articles/immigration-policy-in-france/>
- Gumilar, D. (2020). Eksploitasi Ruang Ketakutan: Analisis Peran Elit Politik dan Kelompok Penekan Dalam Upaya Sekuritisasi Islamofobia Melalui Kebijakan Imigrasi Prancis. *Journal of International Relations*, 6(2), 199–210.
- Hershco, T. (2017). Macron's Election and the Challenges He Faces. Begin-Sadat Center for Strategic Studies No.473. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/resrep04481?seq=1>
- Hollifield, J. F. (2020). Ideas, Institutions, and Civil Society: On the Limits of Immigration Control in France. In G. Brochmann & T. Hammar (Eds.), *Mechanisms of Immigration Control: A Comparative Analysis of European Regulation Policies*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003086062>
- Imamoto, T., Tobe, T., Mizoguchi, K., Ueda, T., Igarashi, T., & Ito, H. (2002). Perivesical abscess caused by migration of a fish bone from the intestinal tract. *International Journal of Urology*, 9(7), 405–406. <https://doi.org/10.1046/j.1442-2042.2002.00480.x>
- Leicester, J., & Corbet, S. (2017). Pro-EU Macron Wins France's Presidency, Le Pen Hopes Dashed. Retrieved from AP News: <https://apnews.com/article/europe-business-france-immigration-migration-91f64d23a96d46098fe2e4c8eb7ca493>

- Masters, J. (2018, Februari 2). Four shot and 18 injured in Calais migrants brawl. Retrieved from CNN: <https://edition.cnn.com/2018/02/02/europe/calais-clashes-migrants-intl/index.html>
- Mcguinness, R. (2018, Agustus 8). France migrant crisis: Charities accuse police of INTIMIDATING Calais aid workers. Retrieved from Express: <https://www.express.co.uk/news/world/1000909/france-news-migrant-crisis-calais-french-police>
- Meyers, E. (2004). *International Immigration Policy*. New York: Palgrave Macmillan.
- Mezger, C., & González-Ferrer, A. (2013). The ImPol Database: A New Tool to Measure Immigration Policies in France, Italy and Spain since the 1960s (Issue January). https://www.researchgate.net/publication/265395473_The_ImPol_Database_A_New_Tool_to_Measure_Immigration_Policies_in_France_Italy_and_Spain_since_the_1960s
- More in Common. (2017). Attitudes Towards Refugee, Immigrants, and Identity in France. Retrieved from More in Common: <https://www.humandignity.foundation/wp-content/uploads/2018/11/Attitudes-towards-refugees-immigrants-and-identity-in-France.pdf>
- Pertiwi, E. A. (2018). Analisis Meningkatnya Fenomena Xenofobia Terhadap Kebijakan Pemerintah Prancis Pada Era Pemerintahan Francois Hollande dan Emmanuel Macron (2012-2018). Dspace UII. Retrieved from Diakses dalam <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/10782>
- Petrikowski, N. P. (2021, Januari 1). Charlie Hebdo Shooting. Retrieved from Britannica: <https://www.britannica.com/event/Charlie-Hebdo-shooting>
- Pew Research Center. (2019). Unauthorized Immigrants in France. Pew Research Center. <https://www.pewresearch.org/global/fact-sheet/unauthorized-immigrants-in-france/>
- Piotrowska-Pelka, D. (2018, Juni 7). First Calais, now Caen. Armed with knives, refugees set up makeshift roadblocks to get into the trucks. Retrieved from Trans.Info: <https://trans.info/en/first-calais-now-caen-armed-with-knives-refugees-set-up-makeshift-roadblocks-to-get-into-the-trucks-95310>
- Piser, K. (2019). Migrants in France Are Paying the Price for Macron's Hard Line on Immigration. *World Politics Review*. <https://www.worldpoliticsreview.com/in-macron-s-france-immigration-policy-is-getting-more-restrictive/>
- Pujayanti, A. (2017). Terpilihnya Macron Sebagai Presiden Dan Hubungan Bilateral Indonesia-Prancis. *Info Singkat DPR RI*(10).
- Puspitarini, R. C., & Afkarin, S. (2018). Kajian Kepribadian Presiden Prancis Emmanuel Macron Menggunakan Level Analisis Individu. *Journal POLITEA*, 1(1). Retrieved from <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/politea/article/view/4323>
- Ratnasari, Y. (2017). Kemenangan Macron Menuai Beragam Komentar Di Prancis. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/kemenangan-macron-menuai-beragam-komentar-di-Prancis-cogT>
- Reuters. (2018). France expels radical imam to Algeria. Reuters. <https://www.reuters.com/article/us-france-imam-idUSKBN1HR1IF>

- Sanapiah, F. (1992). *Format-Format Penelitian Sosial*. Rajawali Press.
- Sharma, A. (2020, Desember 3). France & Austria Terror Attacks 2020: The Looming Shadow of Islamic Terrorism over Europe. Retrieved from Vivekananda International Foundation: <https://www.vifindia.org/article/2020/december/03/france-and-austria-terror-attacks-2020-the-looming-shadow-of-islamic-terrorism-over-europe>
- Sihite, E. (2017, Mei 8). Emmanuel Macron Menang Pemilu, Keberuntungan atau Strategi? Retrieved from Viva.co.id: <https://www.viva.co.id/berita/dunia/913094-emmanuel-macron-menang-pemilu-keberuntungan-atau-strategi>
- Stanton, N. (2018). Still on the Streets—Documenting the situation of refugees and displaced people in Paris. Paris: Refugee Rights Europe. Retrieved from Refugee Rights Europe: https://refugee-rights.eu/wp-content/uploads/2018/08/RRE_StillOnTheStreets.pdf
- Statista Research Department. (2021, Juli 5). Reception of migrants and increase in terrorism according to French people in 2018. Retrieved from STATISTA: <https://www.statista.com/statistics/1173136/terrorism-increase-immigration-france-opinion/>
- Stone, M. (2009). *Jurnal Security According to Buzan: A Comprehensive Security Analysis? GEEST, Security Paper Discussion Papers Series 1*.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Townsend, M. (2018, Maret 17). Migrants tell of abuse and violence on the streets of Paris. Retrieved from The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/2018/mar/17/paris-uk-migrants-attacks-abuse-study>
- Tsoukala, A. (2008). Defining the terrorist threat in the post-September 11 era. In D. Bigo & A. Tsoukala (Eds.), *Terror, Insecurity and Liberty: Illiberal Practices of Liberal Regimes after 9/11*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203926765>
- U.S. Embassy in France. (2017). 2017 Country Report on Terrorism for France. Paris: U.S. Embassy in France. Retrieved from <https://fr.usembassy.gov/2017-country-report-on-terrorism-for-france/>
- Ullman, R. (1983). Redefining Security. *International Security*, 8(1).
- Valmayrilla, Z. (2018). Analisis Faktor Kebijakan Luar Negeri Prancis dalam Penerimaan Pengungsi Suriah Tahun 2015. Skripsi. Retrieved from <http://repository.ub.ac.id/10490/1/Zarra%20Valmayrilla.pdf>
- Valluy, J. (2008). Xénophobie de gouvernement, nationalisme d'Etat. *Cultures & Conflicts*, 63, 193. <https://doi.org/10.4000/conflicts.10183>
- Vickstrom, E. R. (2019). Evolution of Immigration-Control Policies in France, Italy, and Spain. In *Pathways and Consequences of Legal Irregularity* (pp. 29–74). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-12088-7_2
- Voice of America. (2018, Januari 16). Macron Gets Tough on Migrants, Vowing 'No More Jungles'. Retrieved from VOA: <https://www.voanews.com/a/france-calais-macron-asylum/4210043.html>
- Wallis, E. (2020, Oktober 3). New Calais migrant camp dismantled by French authorities. Retrieved from Info Migrant: <https://www.infomigrants.net/en/post/27661/new-calais-migrant-camp-dismantled-by-french-authorities>

- Wicaksono, M. A. (2017). Dinamika Imigran Muslim Di Perancis Melalui Ruang Publik Pada Pemerintahan Nicholas Sarkozy. *Jurnal Transformasi Global*, 4(2).
- Wike, R., Stokes, B., & Simmons, K. (2016). *Europeans Fear Wave of Refugees Will Mean More Terrorism, Fewer Jobs*. Washington: Pew Research Center. Retrieved from <https://www.pewresearch.org/global/2016/07/11/europeans-fear-wave-of-refugees-will-mean-more-terrorism-fewer-jobs/>
- Wolf, S. (2017, April 15). *Immigration, a consensual issue in the French presidential campaign?* Retrieved from LSE: <https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2017/04/15/immigration-a-consensual-issue-in-the-french-presidential-campaign>